

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, L. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (2nd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amaliah, E. F. dan H. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8.2(2337–3806), 1–13.
- Andriani, Meri, Elfitri Santi, R. M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4.
- Asyrofi, M. Z. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah (Studi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2014)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Darsani, H. (2019). Pemprov Kalbar Raih Opini WDP dari BPK RI, Berikut Penjelasan Auditor Keuangan Negara BPK RI. Retrieved January 29, 2020, from [Tribun Pontianak website: https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/27/pemprov-kalbar-raih-opini-wdp-dari-bpk-ri-berikut-penjelasan-auditor-keuangan-negara-bpk-ri](https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/27/pemprov-kalbar-raih-opini-wdp-dari-bpk-ri-berikut-penjelasan-auditor-keuangan-negara-bpk-ri)
- Desmawangga, C. (2019). Serahkan LHP ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK Simpulkan Rata-rata Pengelolaannya Kurang Efektif. Retrieved March 12, 2020, from [Tribun News website: https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/11/serahkan-lhp-ke-pemda-di-kalimantan-utara-bpk-simpulkan-rata-rata-pengelolaannya-kurang-efektif](https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/11/serahkan-lhp-ke-pemda-di-kalimantan-utara-bpk-simpulkan-rata-rata-pengelolaannya-kurang-efektif)
- Djanegara, H. M. S. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.
- Feriyanti, Mira, Hermanto, dan N. K. S. (2015). Determinan Kepatuhan pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal InFestasi*, 11, 171–185.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (9th ed.). Semarang: Undip.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi

- Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Hidayah, D. (2017). Pengaruh Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *JOM Fekon*, 4(2), 4484–4498.
- Jin Liu, B. L. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5, 163–186.
- Khasanah, N. L. dan S. N. R. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864–874.
- Lutfia, Ferina Intan, M. dan B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2656–4955), 82–95.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Dito Aditia Darma , Puja Rizqy Ramadhan, M. D. B. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- _____. *Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2019). Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Jakarta
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Catatan atas Laporan Keuangan*. (2006). Jakarta.
- Permadi, R. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*.
- Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Simbolon, H. A. U. & C. H. K. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *MODUS*, 30(1), 54–70.

- Subroto, B. (2014). *Pengungkapan Wajib Perusahaan Publik: Kajian Teori dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadilagaa, Citra, Arie Pratama, P. S. M. (2015). Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *ELSEVIER*, 211, 513–518.
- Suparno, S., & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5390>
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- _____. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*. (2004). Jakarta.
- _____. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta.
- _____. *Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. (2004). Jakarta.
- Wulandari, A. (2017). Inilah Sejumlah Temuan BPK Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalsel. Retrieved January 29, 2020, from Banjarmasin Post website: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/11/inilah-sejumlah-temuan-bpk-pada-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-di-kalsel>
- Yunanto. (2010). *Intellectual Capital Disclosure dan Karakteristik Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.